



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Surat Pernyataan telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
VI. Lampiran dan Daftar	58





Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.099.832.348 atau mencapai 104,67 persen dari PAGU yang tersedia sebesar Rp.1.050.800.000,- Yang diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.10.952.813 atau mencapai 93,27 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.743.677.000.

*Ringkasan Laporan realisasi Anggaran Semester II TA 2019 dan 2018*

Uraian	TA 2019			TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara	1.050.800.000	1.099.832.348	104,67	823.650.000
Belanja Negara	11.743.677.000	10.952.813.184	93,27	7.711.999.599

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp29.007.861.265 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 19.104.576; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Uang Muka dari KPPN Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp28.987.894.300; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.711.300.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp29.007.861.265.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah Pendapatan Negara bukan pajak Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.099.925.376, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 11.085.282.205 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(9.985.356.829). Sehingga Jumlah Surplus/ (Defisit) – LO sebesar Rp.

( 9.985.214.310).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.840.199.939 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(9.985.365.399) ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.152.875.636 dan terjadi penurunan Ekuitas sebesar Rp.(167.510.237) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp29.007.710.176.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31/12/2019		% thd Angg	31/12/2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.050.800.000	1.099.832.348	104,67	823.650.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.050.800.000</b>	<b>1.099.832.348</b>	<b>104,67</b>	<b>823.650.000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	2.261.860.000	1.873.008.442	82,81	771.809.652
Belanja Barang	B.4	8.529.448.000	8.130.644.250	95,32	6.601.689.947
Belanja Modal	B.5	952.369.000	949.160.492	99,66	338.500.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>11.743.677.000</b>	<b>10.952.813.184</b>	<b>93,27</b>	<b>7.711.999.599</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30/09/2019	30/09/2018
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	325.376	90.949
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	18.779.200	4.045.940
Jumlah Aset Lancar		<b>19.104.576</b>	<b>4.136.889</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	26.205.300.000	26.205.300.000
Peralatan dan Mesin	C.15	6.068.625.560	4.931.965.868
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	6.400.000	6.400.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	527.278.923	527.278.923
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(3.820.710.183)	(2.837.448.691)
Jumlah Aset Tetap		<b>28.986.894.300</b>	<b>28.833.496.100</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	3.422.600	3.422.600
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.711.300)	(855.650)
Jumlah Aset Lainnya		<b>1.711.300</b>	<b>2.566.950</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>29.007.710.176</b>	<b>28.840.199.939</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	29.007.710.176	28.840.199.939
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>29.007.710.176</b>	<b>28.840.199.939</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>29.007.710.176</b>	<b>28.840.199.939</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 Dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31/12/2019	31/12/2018
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.099.925.376	821.490.949
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.099.925.376</b>	<b>821.490.949</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	1.873.008.442	771.809.652
Beban Persediaan	D.3	89.279.340	65.883.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.971.167.390	4.297.963.781
Beban Pemeliharaan	D.5	318.676.320	214.908.000
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	D.6	<b>2.699.574.660</b>	<b>1.923.675.816</b>
<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	D.7	<b>149.610.000</b>	<b>99.970.000</b>
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	984.117.142	916.870.865
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Transfer			
Beban Lain-lain			
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>11.085.433.294</b>	<b>8.291.081.114</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(9.985.507.918)</b>	<b>(7.469.590.165)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		142.519	88.080
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya			111.640
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya			(23.560)
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>142.519</b>	<b>(23.560)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(9.985.365.399)</b>	<b>(7.469.613.725)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(9.985.365.399)</b>	<b>(7.469.613.725)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31/12/2019	31/12/2018
EKUITAS AWAL	E.1	28.840.199.939	29.414.444.065
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(9.985.365.399)	(7.469.613.725)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	10.152.875.636	6.895.369.599
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	167.510.237	(574.244.126)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>29.007.710.176</b>	<b>28.840.199.939</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Jember**

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 06 Oktober 2014 di Surabaya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tanggal 06 Oktober 2014. Saat ini ISBI Aceh memiliki lahan 30 Ha di Kota Jantho, yang nantinya akan dibangun kampus terpadu.

Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya Aceh di Sumatera. ISBI Aceh saat ini memiliki 2 Fakultas dengan 5 Program Studi, yaitu:

### **1. Fakultas Seni Pertunjukan (FSP)**

- a. Program Studi Seni Karawitan
- b. Program Studi Seni Tari
- c. Program Studi Teater
  - Penyutradaraan
  - Pemeranan

### **2. Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)**

- a. Program Studi Seni Murni
  - Seni Lukis
  - Seni Grafis
  - Seni Rupa
- b. Program Studi Seni Kriya
  - Kriya Kayu
  - Kriya Keramik

- Kriya Logam
- Kriya Kulit
- c. Program Studi Desain Komunikasi Visual

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi bidang seni, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun regional. Sebagai salah satu Institut Seni di Aceh yang mengutamakan mutu, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki keselarasan dalam antara IPTEK, Ilmu Seni dan IMTAQ. Keseimbangan diantara keduanya menjadi komponen utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti, menjunjung tinggi etika, estetika serta berakhlak mulia.

#### **A.1.1. Visi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

Visi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah ***“mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berkebudayaan melayu”***.

#### **A.1.2. Misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi menuju masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius.
2. Mengembangkan semangat penelitian dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki elan vital semangat hidup kepada pengembangan pengetahuan dan karya seni budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
4. Membangun kerjasama antar lembaga, institusi dan unsur-unsur lainnya yang relevan.

#### **A.1.3. Tujuan dan Sasaran Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

1. Membangun wadah pendidikan tinggi di bidang seni dan budaya yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi,
2. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing, berakhlak mulia, kreatif, berwawasan luas, dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu berperan dalam pembangunan bangsa.

3. Menghasilkan penelitian, publikasi dan produk seni dan budaya unggulan yang berdayaguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni dan budaya serta masyarakat pengguna.
4. Meningkatkan keterlibatan seniman dan penggiat budaya dalam melindungi, mengembangkan dan mempromosikan potensi budaya lokal dalam lingkup nasional dan internasional.
5. Meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal.

### **Sasaran Strategis**

1. Menjadi institusi perguruan tinggi yang terakreditasi dan berbadan hukum (BLU/BH).
2. Menjadikan ISBI Aceh sebagai salah satu lembaga pendidikan bermutu dan daya saing tinggi.
3. Menghasilkan produk seni dan budaya berbasis pendidikan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Mencermati visi, misi, dan tujuan ISBI Aceh, secara tersirat terlihat bahwa sebuah perguruan tinggi maju, modern, dan unggul harus mampu disetarakan sebagai “*world class university*”. Perguruan Tinggi yang maju ini tidak boleh tercerabut dari akarnya, yaitu kebudayaan. *World class university* ini merupakan cita-cita yang harus dituju. Hal ini merupakan hal yang tidak mudah dicapai, memerlukan perjuangan dan kerja keras.

Dengan ditetapkan sasaran ini akan tampak suatu petunjuk arah yang akan menumbuhkan inspirasi dan motivasi seluruh keluarga besar ISBI Aceh. Untuk merealisasikan tujuan ini harus disusun arah pengembangan (*road map*) yang jelas dan dilaksanakan secara bertahap.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### *Basis Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### *Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### *Kebijakan Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

##### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

#### **Definisi**

Aset ialah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Universitas Jember terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara penerima, saldo rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan saldo uang tunai.

##### a. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk.

##### b. Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

##### c. Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.

#### 2. Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya per tanggal neraca.

Dalam hal ini merupakan piutang dari pendapatan pendidikan, yaitu piutang yang timbul dari jasa pendidikan, seperti:

- Piutang dari pendapatan SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Piutang dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

a. Pengakuan

Piutang SPP/UKT diakui pada saat batas akhir tanggal pembayaran sesuai dengan surat keputusan dan tidak disertai dengan pembayaran oleh mahasiswa yang didukung oleh tanda bukti surat penundaan oleh pejabat berwenang, berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disetujuinya surat penundaan. Piutang SPI diakui pada saat batas akhir yaitu satu semester yang ditetapkan tidak terbayarkan sehingga sampai masuk periode semester berikutnya.

b. Pengukuran

Piutang diukur berdasarkan Daftar Piutang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan tersebut.

Kategori yang bisa diakui sebagai piutang :

1. Mahasiswa aktif yang mengajukan penundaan.
2. Mahasiswa yang belum membayar melebihi batas akhir penundaan.

c. Penghapusan

Dalam hal piutang yang telah dibentuk penyisihannya diyakini tidak akan tertagih maka dapat menghapuskan piutang sesuai peraturan perundang-undangan.

Penghapusan piutang dilakukan apabila piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (DJKN) atau telah diterbitkannya surat keputusan *drop out*.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai

perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	3. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	4. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap

### b. Aset Tetap

#### Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Universitas Jember atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan batasan pengertian tersebut maka Universitas Jember harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Universitas Jember juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap.
- b. Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria :
  1. Berwujud
  2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibagikan kepada masyarakat, tetapi digunakan dalam kegiatan operasional Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan kegiatan operasional pihak lain selama hak kepemilikan tidak berpindah tangan.

#### Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Prsedien Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementeroian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Penyusutan Aset  
Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## Piutang Jangka Panjang

### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

## Aset Lainnya

### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis

lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7) Ekuitas**

### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Implementasi*

#### *Akuntansi*

#### *Berbasis Akrual*

#### *Pertama Kali*

## **(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp1.099.832.348

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.099.832.348 atau mencapai 104,67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.050.800.000. Pendapatan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh terdiri dari Pendapatan Uang Pendidikan, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Pendidikan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	15.000.000	4.400.000	29,33
Pendapatan Uang Pendidikan	1.035.800.000	1.095.200.000	105,73
Pendapatan Jasa		90.949	
Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	141.399	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.050.800.000</b>	<b>1.099.832.348</b>	<b>104,67</b>

Adapun Realisasi Pendapatan Uang Pendidikan TA 2019 dari :

1. Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) Sebesar Rp. 1.035.800.000

*Perbandingan Realisasi PNBP 30 September 2019 dan 30 September 2018*

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan jasa	90.949	-	0,00
Pendapatan PNBP	1.035.800.000	819.650.000	0,79
<b>Jumlah</b>	<b>1.035.890.949</b>	<b>819.650.000</b>	<b>0,79</b>

Realisasi Belanja

Negara

Rp10.952.813.184

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.952.813.184 atau 93,27% dari anggaran belanja sebesar Rp11.743.677.000. Secara garis besar belanja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dikelompokkan kedalam 3 Golongan belanja dengan rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

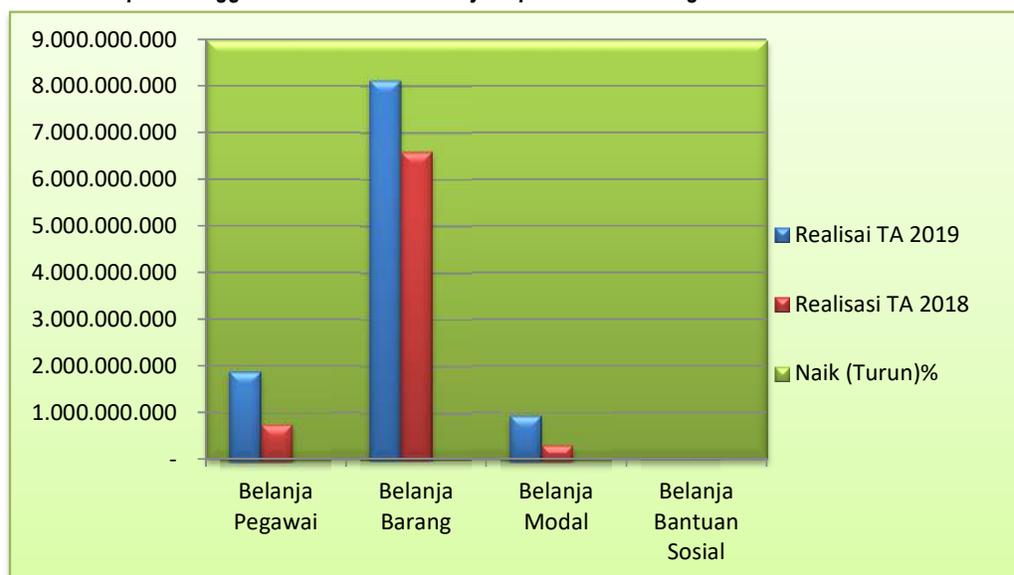
## Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.261.860.000	1.873.008.442	82,81
Belanja Barang	8.529.448.000	8.130.644.250	95,32
Belanja Modal	952.369.000	949.160.492	99,66
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>11.743.677.000</b>	<b>10.952.813.184</b>	<b>93,27</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>11.743.677.000</b>	<b>10.952.813.184</b>	<b>93,27</b>

### Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.873.008.442	771.809.652	59%
Belanja Barang	8.130.644.250	6.601.689.947	19%
Belanja Modal	949.160.492	338.500.000	64%
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>10.952.813.184</b>	<b>7.711.999.599</b>	<b>30%</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Belanja Pegawai  
Rp1.872.986.116

### B.3 Beban Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.872.986.116 dan 758.785.472. Beban Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai.
2. Penambahan remunerasi PNS.

Gambaran tentang pagu dan realisasi belanja pegawai 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

*Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-19	31-Dec-18
Belanja Gaji Pokok PNS	1.057.203.040	377.450.064
Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.409	5.637
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	69.252.544	40.161.705
Belanja Tunj. Anak PNS	16.683.144	9.808.578
Belanja Tunj. Struktural PNS	47.180.000	19.440.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	184.100.000	153.192.044
Belanja Tunj. PPh PNS	8.025.388	5.677.074
Belanja Tunj. Beras PNS	66.289.800	24.115.860
Belanja Uang Makan PNS	285.651.000	94.895.000
Belanja Tunj. Umum PNS	68.460.000	12.055.000
Belanja Uang Lembur	71.790.000	32.384.100
Belanja Tunj. Tenaga Pendidik Lainnya Non PNS	0	2.625.000
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>	<b>1.874.659.325</b>	<b>771.810.062</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>(1.650.883)</i>	<i>(410)</i>
<b>Realisasi Belanja Netto</b>	<b>1.873.008.442</b>	<b>771.809.652</b>

Pengembalian belanja pegawai pada realisasi belanja pegawai periode 30 Desember 2019 adalah pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.1.083,- dan pengembalian Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp.1.649.800,-.

*Belanja Barang*  
*Rp7.732.204.790*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.732.204.790 dan Rp6.808.446.378. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 12,00% dari Realisasi Belanja Barang TA 31 Desember 2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja Langgan Listrik dan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai periode 31 Desember

2019.

*Perbandingan Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	2.654.295.645	2.961.610.820	-12%
Belanja Pengiriman Surat Pos Pusat	2.690.600	4.931.800	-83%
Belanja Honor Satuan Kerja	173.092.800	111.140.000	36%
Belanja Barang Operasional Lainnya	57.953.000	90.468.200	-56%
Belanja Bahan	347.328.000	201.457.000	42%
Belanja Honor Output Kegiatan	134.330.000	125.525.000	7%
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	737.439.000	737.493.000	0%
Belanja Barang Persediaan barang konsumsi	83.942.540	61.515.000	27%
Belanja Langganan Listrik	331.832.400	84.650.000	74%
Belanja Langganan Air	19.335.100	37.080.954	-92%
Belanja Langganan Telfon	120.000	-	100%
Belanja Sewa	199.162.000	75.410.000	62%
Belanja jasa profesi	136.680.000	34.400.000	75%
Belanja Jasa lainnya	64.461.100	54.180.388	16%
belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	259.095.800	173.073.400	33%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	52.445.000	34.265.000	35%
Belanja Perjalanan Biasa	2.414.195.210	1.215.648.100	50%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	153.361.800	126.004.200	18%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	19.520.000	-551%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.069.650	540.841.576	-507%
Perjalanan Dinas Luar Negeri	39.948.000	21.661.940	0%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	97.570.000	0%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>7.953.777.645</b>	<b>6.808.446.378</b>	<b>86%</b>
Pengembalian Belanja	(1.455)	-	0%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>7.953.776.190</b>	<b>6.808.446.378</b>	<b>14%</b>

*Belanja Modal Rp.0*

**B.5. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan hal ini disebabkan tidak adanya pagu belanja modal untuk tanah.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### B.6. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp949.160.492, dan Rp.291.600.000,

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Modal Peralatan dan Mesin	949.160.492	291.600.000	225,50
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>949.160.492</b>	<b>291.600.000</b>	<b>225,50</b>
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>949.160.492</b>	<b>291.600.000</b>	<b>225,50</b>

### B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan R0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan dikarenakan tidak tersedianya pagu anggaran untuk kegiatan belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
BelanjaModal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal untuk kegiatan penambahan jalan, irigasi, dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI per 31/12/2019	REALISASI per 31/12/2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.9 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tidak ada kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan tidak adanya pagu anggaran untuk kegiatan tersebut.

Uraian Jenis Belanja	30-Dec-19	30-Dec-18	Naik(Turun) %
Modal Lainnya	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

*Belanja Bantuan Sosial Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada 30 September 2019 tidak mengalami kenaikan/penurunan hal ini disebabkan tidak adanya pagu Belanja Bantuan Sosial dalam DIPA ISBI Aceh Periode 31 Desember 2019.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
30 September 2019 dan 30 September 2018*

URAIAN	REALISASI per 31/12/2019	REALISASI per 31/12/2018	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	31/12/2019	31/12/2018
Uang Direkening	-	-
Uang Tunai di Brankas	-	-
Kwintansi UP	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp 325.376

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp325.376,- dan Rp90.949,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	30/01/2019	31/12/2018
Uang di rekening	325.376	90.949
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>325.376</b>	<b>90.949</b>

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	31/12/2019	31/12/2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Piutang PNBPN Rp0*

**C.4 Piutang PNBPN**

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	31/12/2019	31/12/2018
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Nama	31/12/2017	31/12/2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Bagian Lancar TPA  
Rp0*

**C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA 30 September 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Nama	31/12/2017	31/12/2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang Lancar  
Rp0*

**C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 31 Desember  
2019 dan 31 Desember 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar di Muka  
Rp0*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	31/12/2017	31/12/2016
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus

Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	31/12/2019	31/12/2018
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp18.779.200*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp18.779.200 dan Rp4.045.940.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	30/09/2019	31/12/2018
Barang Konsumsi	18.779.200	3.840.980
Barang untuk Pemeliharaan	-	176.960
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	28.000
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.779.200</b>	<b>4.045.940</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2019 dan 31  
Desember 2018*

No	Debitur	31/12/2019	31/12/2018
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

No	Debitur	31/12/2017	31/12/2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

*Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31  
Desember 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>		-	-

*Tanah*

*Rp26.205.300.000*

**C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Institut Seni Budaya Indonesia Aceh per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp26.205.300.000,- dan tidak ada penambahan nilai sampai dengan per 31 Desember 2019. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	26.205.300
<b>Pembelian</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
<b>Saldo per 30 September 2019</b>	<b>26.205.300</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah 31 Desember 2019*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	200.000 m2	Buket Meusara Jantho	17.473.408.000
2	100.000 m2	Buket Meusara Jantho	8.731.892.000
3			-
4			-
<b>Jumlah</b>			<b>26.205.300.000</b>

*Peralatan dan Mesin*

*Rp6.068.625.560*

**C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp6.068.625.560 dan Rp4.931.965.868. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>4.931.965.868</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	836.764.892
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	299.894.800
Koreksi tambah	-
Reklasifikasi dari aset lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	-
Penghapusan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>6.068.625.560</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(3.729.011.907)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>2.339.613.653</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian Peralatan Mesin sebesar Rp836.764.892,-
- Transfer masuk aset peralatan dan mesin dari Universitas Malang untuk kegiatan SNNPTN – SBMPTN Sebesar Rp.7.500.000 dan untuk kegiatan LTMP( Lembaga Tes masuk Perguruan Tinggi sebesar 280.000.000,-
- Transfer masuk aset peralatan mesin dari Universitas Andalas sebesar Rp. 12.394.800,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## Gedung dan Bangunan

Rp0

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2019</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 September 2019</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	-
<b>Nilai Buku per 30 September 2019</b>	<b>-</b>

Tidak terjadinya transaksi penambahan Gedung dan Bangunan karena belum adanya belanja modal gedung permanen yang berasal dari DIPA ISBI Aceh

selama Tahun Anggaran 2019.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan Irigasi*  
*Rp6.400.000*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.400.000 dan Rp6.400.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>6.400.000</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan nilai	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>6.400.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2019	(5.900.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>500.000</b>

Mutasi tambah/kurang:

- Tidak terjadinya mutasi tambah/kurang pada Tahun Anggaran 2019 ini.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp527.278.923*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp527.278.923 dan Rp527.278.923. Aset tetap Lainnya tersebut berupa barang bercorak kesenian, Bahan Perpustakaan Tercetak dan Alat Bercorak Kebudayaan. Aset tetap Lainnya tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Periode 31 Desember 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>527.278.923</b>
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>527.278.923</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(85.647.187)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>441.631.736</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0*

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp3.820.559.094*

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp3.820.559.094 dan Rp2.838.304.341. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.068.625.560	3.729.011.907	2.339.613.653
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.400.000	5.900.000	500.000
4	Aset Tetap Lainnya	527.278.923	85.647.187	441.631.736
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>6.602.304.483</b>	<b>3.820.559.094</b>	<b>2.781.745.389</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud Rp0*

### C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah Rp.3.422.600,-dan Rp.3.422.600,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018</b>	<b>3.422.600</b>
Mutasi tambah: Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>3.422.600</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	(1.711.300)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	<b>1.711.300</b>

Mutasi tambah:

- -
- -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2019*

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer	3.422.600
-	-
<b>Jumlah</b>	

### Aset Lain-Lain Rp0

### C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Penambahan adalah dari reklasifikasi ..... yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi senilai ....
- ✓ Penghapusan .... Berupa ... senilai.....

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	Rp	-
<b>Mutasi Tambah:</b>		
reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
<b>Mutasi Kurang:</b>		
penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>		
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019		
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2019</b>	Rp	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.1.711.300*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.855.650 dan Rp.1.711.300. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	3.422.600	1.711.300	1.711.300
<b>Jumlah</b>	<b>3.422.600</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.711.300</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.422.600</b>	<b>1.711.300</b>	<b>1.711.300</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp0

### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	-
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	-
<b>Total</b>	-	-

Pendapatan Diterima di  
Muka  
Rp0

### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
<b>Total</b>	-

Beban yang Masih  
Harus Dibayar Rp0

### C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak

ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 30 September 2019 dan 31 Desember 2018*

uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		

*Ekuitas*

*Rp29.007.710.176*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.007.710.176 dan Rp28.840.199.939. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB  
Rp1.099.925.376

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.099.925.376. dan Rp.821.490.949. Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	1.095.200.000	817.490.949	75%
Pendapatan Pendidikan Lainnya	4.400.000	4.000.000	91%
<b>Jumlah</b>	<b>1.099.600.000</b>	<b>821.490.949</b>	<b>75%</b>

Pendapatan Pendidikan dan Pendidikan Lainnya berasal dari iuran SPP Mahasiswa ISBI Aceh.

Beban Pegawai  
Rp1.199.280.364

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.199.280.364 dan Rp.560.060.911. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

#### *Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.801.218.442	739.425.552	41%
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	0%
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0%
Beban Lembur	71.790.000	32.384.000	0%
<b>Jumlah</b>	<b>1.873.008.442</b>	<b>771.809.552</b>	<b>41%</b>

Beban Persediaan  
Rp96.414.860

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp96.414.860 dan Rp73.452.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	83.942.540	61.515.000	73%
Beban Persediaan Bahan Baku	744.800	476.000	64%
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Lainnya	4.592.000	3.892.000	85%
<b>Jumlah</b>	<b>89.279.340</b>	<b>65.883.000</b>	<b>74%</b>

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp4.971.167.396

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.971.167.396 dan Rp.4.279.018.881.

Beban Jasa adalah Konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

#### *Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.654.295.645	2.961.610.820	-12%
Beban Pengiriman Surat Pos Pusat	2.690.200	4.931.800	-83%
Beban Honor Satuan Kerja	173.092.800	111.140.000	36%
Beban Barang Operasional Lainnya	57.953.000	90.468.200	-56%
Beban Bahan	347.328.000	201.457.000	42%
Beban Honor Output Kegiatan	134.330.000	125.525.000	7%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	737.491.545	515.867.600	30%
Beban Langganan Listrik	331.832.400	84.983.969	74%
Beban Langganan Air	19.335.100	37.080.954	-92%
Beban Langganan Telfon	120.000	-	100%
Beban Sewa	199.162.000	75.410.000	62%
Beban jasa profesi	136.680.000	34.400.000	75%
Beban Jasa lainnya	64.461.100	54.180.388	16%
Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	112.395.600	908.050	0%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.971.167.390</b>	<b>4.297.963.781</b>	<b>14%</b>

Tabel diatas menunjukkan terjadinya peningkatan beban barang dan jasa pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.

*Beban Pemeliharaan  
Rp318.676.320*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp318.676.320 dan Rp214.908.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	259.095.800	173.073.400	67%
Beban Pemeliharaan Lainnya	52.445.000	34.265.000	65%
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	7.135.520	7.569.600	106%
<b>Jumlah</b>	<b>318.676.320</b>	<b>214.908.000</b>	<b>67%</b>

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.699.574.660 dan Rp1.923.675.816. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30/09/2019	30/09/2018	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	2.414.195.210	1.215.648.100	50%
Beban Perjalananan Dinas Dalam Kota	153.361.800	126.004.200	18%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000	19.520.000	-551%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.069.650	540.841.576	-507%
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negri	39.948.000	21.661.940	0%
<b>Jumlah</b>	<b>2.699.574.660</b>	<b>1.923.675.816</b>	<b>29%</b>

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat  
Rp149.610.000*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp149.610.000. dan Rp99.970.000. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada periode 31 Desember 2019. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	2.400.000	0%
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda	-	97.570.000	0%
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	149.610.000	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>149.610.000</b>	<b>99.970.000</b>	<b>67%</b>

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada

masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2019	30/06/2018	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp984.117.142*

### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp984.117.142 dan Rp916.870.865. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*

*31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	967.686.956	892.744.993	92%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	1.311.111	1.311.111	100%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.263.425	21.959.111	154%
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>983.261.492</b>	<b>916.015.215</b>	<b>93%</b>
Beban Amortisasi Software	855.650	855.650	100%
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>855.650</b>	<b>855.650</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>984.117.142</b>	<b>916.870.865</b>	<b>93%</b>

### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2019 dan 30 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 September 2019 dan 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	30/09/2019	30/09/2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp142.519*

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31/12/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	142.519	88.080	0,62
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>142.519</b>	<b>88.080</b>	<b>0,00</b>

*Pos Luar Biasa Rp0*

**D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31/06/2019	31/12/2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp28.840.199.939*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.840.199.939 dan Rp29.414.444.065

*Defisit LO*  
*Rp9.985.365.399*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp9.989.365.399 dan Rp7.469.613.725. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0*

### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RP.0. dan RP.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	RP.
Suku Cadang	RP.
Barang Persediaan Lainnya	RP.
Jumlah	RP.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan Rp0*

### **E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Koreksi Aset Tetap*  
*Non Revaluasi Rp0*

### **E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### *Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Periode 31 Desember 2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain

Rp0

### E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar

Entitas

Rp10.152.875.636

### E.3.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.152.875.636 dan Rp6.895.369.599. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.952.813.184
Diterima dari Entitas Lain	(1.099.832.348)
Transfer Masuk	299.894.800
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>10.152.875.636</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp1.099.832.348 sedangkan DKEL sebesar Rp10.952.813.184.

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp299.894.800 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	-	-
2	Tanah	-	-
3	Peralatan Mesin	Universitas Malang dan Universitas Andalas	299.894.800
4	Jaringan	-	-
5	Persediaan	-	-
<i>Jumlah</i>			<i>299.894.800</i>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0.

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang periode 31 Desember 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Periode 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*

*Rp28.479.547.568*

### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.007.710.176 dan Rp28.840.199.939.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

## F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 30 September 2019 di rekening Bendahara Penerimaan masih ada selisih kas sebesar Rp.50.000 yang disebabkan oleh Pemotongan administrasi bank Syariah Mandiri Juli Rp.25.000. dan bulan Agustus Rp. 25.000. untuk menanggulangi hal tersebut Bendahara Penerimaan sudah mengkomunikasikan kepada pihak Bank BSM untuk menghilangkan Potongan administrasi 25.000 dan Pihak Bank telah menyetujui.

## F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 387/M/KPT/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor: 0138/IT11/KU/2019 Tanggal 23 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun Anggaran telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA

Pejabat Pembuat Komitmen : Al Munzir, S.Pd.I, M.Si

Pejabat Penandatanganan/Penguji : Zahrul Fuadi, ST. M.Sc

SPM

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA

Pejabat Pembuat Komitmen : Al Munzir, S.Pd.I, M.Si

Pejabat Penandatanganan/Penguji : Ir. Syahrizal, M.T

SPM

Bendahara Pengeluaran : Ikhsan

Bendahara Penerimaan : Ammar Yasir, S.Pd

Pegawai

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam Tahun 2019 menerima Pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) sebesar Rp.7.705.338.000,- dengan nomor DIPA-042.01.2.400877/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan telah menjadi revisi sebagai berikut:

1. Revisi 1 dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.903.973.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 03 Mei 2019 Dengan Perubahan Tambahan pagu dari periode sebelumnya, Adanya penambahan BOPTN, Operasional, pemeliharaan Perkantoran dan Penambahan pagu Belanja Pegawai
2. Revisi II dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.903.973.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 13 Mei 2019 Dengan Perubahan mata anggaran keluaran antar output Kegiatan.
3. Revisi III dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.903.973.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 25 Juni 2019 Dengan Perubahan mata anggaran keluaran antar output Kegiatan.
4. Revisi IV dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.903.973.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 23 Oktober 2019 Dengan Perubahan mata anggaran keluaran antar output Kegiatan.
5. Revisi V dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.12.903.973.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 11 November 2019 Dengan Perubahan mata anggaran keluaran antar output Kegiatan.
6. Revisi VI dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.11.743.677.000,- dengan Nomor DIPA-042.-1.2.400877/2019 tanggal 10 Desember 2019 Dengan Pengurangan Belanja Pegawai.
7. Revisi VII dengan pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.11.743.677.000,- dengan Nomor DIPA-042.-

1.2.400877/2019 tanggal 18 Desember 2019 Dengan Perubahan mata anggaran keluaran antar output Kegiatan.

## VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

